



Strategi program dinas sosial Provinsi Sumatera Utara dalam pemberdayaan masyarakat demi mengentaskan kemiskinan di era revolusi 5.0

Daniel Putra Roge Hia¹, Ivansyah Fauzie², Lola Suhaini Lubis³, Terry Theresia Turnip⁴, Thessa Theresia Siagian⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

¹putrahia44@gmail.com, ²ivansyahfauzie8@gmail.com, ³lolasuhainilubis@gmail.com, ⁴terrytheresia00@gmail.com,

⁵thessasiagian@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

5 Oktober 2022

Disetujui :

20 Oktober 2022

Dipublikasikan :

25 Oktober 2022

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan kondisi dimana setiap individu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Antara lain ada 3 penyebab kemiskinan yakni kondisi cacat mental dan fisik, yang kedua adalah kondisi alam dimana manusia dan alam tidak saling mendukung sehingga alam tidak juga mendukung aktivitas manusia serta yang ketiga adalah Sumber Daya Manusia terhadap segala aktivitas kehidupan yang dilakukannya. Faktor-faktor negatif yang dilakukan oleh manusia itu sendiri bisa menyebabkan kemiskinan salah satunya adalah faktor malas. Revolusi Industri 5.0 sudah termasuk dalam era Digitalisasi dimana semua pekerjaan sudah diakomodir dan dikerjakan oleh mesin maupun perangkat digital lainnya. Di zaman sekarang ini revolusi 5.0 dapat menjadi pendorong dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda sebuah negara serta sangat bagus dan tepat untuk menunjang kinerja-kinerja dalam brokrasi sehingga brokrasi dapat berjalan cepat dan tepat guna khususnya dalam mengatasi kemiskinan. Dengan cara adalah pembuatan teknologi yang bisa memudahkan dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya adalah pembuatan website serta aplikasi bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran bagi masing-masing penerimanya. Pemberdayaan masyarakat secara langsung juga salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang melatih Sumber Daya Masyarakat itu sendiri maupun memfasilitasi setiap langkah kegiatan masyarakat dalam mencapai kegiatan sehari-hari.

Kata kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Sosial

ABSTRACT

Poverty is a condition where every individual cannot fulfill basic needs such as clothing, food and shelter. Poverty is a problem that occurs in various countries, including Indonesia, because of many factors that influence it. Among other things, there are 3 causes of poverty, namely mental and physical disabilities, the second is natural conditions where humans and nature do not support each other so that nature also does not support human activities and the third is Human Resources for all available life activities. Negative factors that are carried out by humans themselves can cause poverty, one of which is the lazy factor. The Industrial Revolution 5.0 has been included in the Digitalization era where all work has been accommodated and done by machines and other digital devices. In today's era, revolution 5.0 can be a driving force in alleviating poverty that has hit a country and is very good and appropriate to support performances in the brocracy so that the brocracy can run quickly and effectively, especially in overcoming poverty. One way is the creation of technology that can facilitate poverty alleviation, one of which is the creation of websites and social assistance applications so that the social assistance is right on target for each recipient. Direct community empowerment is also one way of alleviating poverty through programs that train Community Resources itself as well as every step of community activities in achieving daily activities.

Keywords: Poverty, Community Empowerment, Social Assistance



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Revolusi 5.0 merupakan tahapan modernisasi yang menghasilkan teknologi dengan era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Pada revolusi ini mengedepankan fokus pendayagunaan antara berbagai aspek, seperti manusia, data serta teknologi yang dikenal dengan era kebangkitan society. Perubahan dinamika laju pergerakan yang awalnya terpusat bahwa manusia sebagai objek vital dalam berkembangnya sistem secara Fundamental dalam perekonomian telah mengalami pergeseran . dengan kata lain dalam era ini segala aktivitas manusia sudah dikuasai dengan percepatan teknologi yang mumpuni[1].

Oleh sebab itu pola pemberdayaan masyarakat (empowerment) adalah sebagai strategi yang cepat dalam upaya pembangunan ekonomi yang telah berkembang di berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam penerapannya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sesuatu yang penting dan saling berkaitan dengan kemajuan dan perubahan suatu bangsa, bila dikaitkan dengan kemampuan masyarakat yang kurang serta akan menghambat pembangunan ekonomi[2]. Konsep pembangunan yang sudah berjalan saat ini belum menjawab berbagai tantangan dielektika pembangunan serta tuntutan dari berbagai aspek masyarakat yang menyangkut keadilan, keberpihakan dan pemerataan kepada masyarakat. Sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup di -bawah garis kemiskinan yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh ketidaktersediaannya lapangan pekerjaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai. Dalam dunia kemiskinan ini kerap kaitannya dengan bentuk kekurangan gizi, air, perawatan kesehatan yang kurang baik, tempat tinggal yang sehat, dan rendahnya tingkat Pendidikan[3].

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat tampaknya tidak lepas oleh pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama dalam pembangunan untuk mereduksi terjadinya kemiskinan tersebut[4].

Dari beragam permasalahan yang tertera di atas, secara konstitusional memang jelas bahwa pemerintah hadir untuk menjawab beragam permasalahan sosial yang kompleks dan signifikan yang ada di kehidupan masyarakat[5].

Salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di Sumatera Utara dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah terbatasnya lapangan kerja untuk masyarakat dan kurangnya sumber daya yang nantinya menyebabkan pengangguran di setiap negara. Ada beberapa penyebab kemiskinan antara lain yaitu:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang misalnya, cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja dan lain-lain.
2. Kemiskinan yang disebabkan oleh alam misalnya, kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya masing-masing.
3. Kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Akibat kultural masyarakat tertentu misalnya, rasa malas, tidak produktif, terlalu bergantung pada harta warisan, dan lain-lain.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui program dinas sosial pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode berupa pengamatan dengan melihat, mencatat, mendeskripsikan, dan melaporkan kegiatan dengan cara mengumpulkan dokumen berupa data, gambar, hasil wawancara, dan jenis data lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Jl. Sampul No.138, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118

Jenis Data

Ini sumber data yang akan digunakan berupa jenis data primer, karena data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Untuk pengumpulan data dilakukan wawancara kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Bidang Fakir Miskin sebagai narasumber informasi yang dibutuhkan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung untuk memperoleh data.

Jenis data penelitian sekunder kami gunakan untuk mendukung data primer dalam bentuk pengumpulan data yang kami targetkan dari hasil wawancara seperti, dokumen-dokumen yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berupa data dan gambar sebagai validitas hasil penelitian yang kami lakukan.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yaitu data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasikan, dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara. Pengumpulan data dengan cara:

1. Perencanaan; Penelitian merancang hasil wawancara baik wawancara maupun data yang telah ditemukan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara
2. Pelaksanaan; Peneliti melaksanakan pengamatan dan memahami bagaimana peran pemerintah terhadap kaum disabilitas dalam pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Batu dan Kota Malang sehingga dapat menyimpulkan. Selanjutnya Peneliti menguji coba, menganalisis dan menetapkan instrumen penelitian.
3. Evaluasi; Pada tahap ini peneliti akan menganalisis dan mengelola data yang telah dikumpulkan dengan metode yang sudah ditentukan.

Penyusunan Laporan; Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun hasil dari pada pengumpulan data dan melaporkan hasil-hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Kesejahteraan Sosial kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, hambatan, dan perubahan permasalahan sosial yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti masih terbatasnya akses pelayanan dasar bagi fakir miskin, meningkatnya jumlah anak terlantar karena kondisi ekonomi dan kerentanan. Untuk itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara khususnya bidang Fakir Miskin melakukan percepatan dalam mengatasi masalah tersebut. Diantaranya adalah program Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Program Usaha Ekonomi Produktif

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh Direktorat Penanganan Fakir miskin. Usaha Ekonomi Produktif merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada fakir miskin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Sasaran kegiatan ini dengan mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi ditingkat lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Bantuan stimulan UEP diberikan senilai Rp. 2.000.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat yang berusia 18 sampai dengan 60 tahun dan masih produktif, sebagai Kepala Keluarga, terdaftar dalam BDT, memiliki KK/KTP dan Surat Keterangan Domisili. Bantuan UEP bertujuan;

- 1) Pemberian modal usaha Penerima Manfaat,
- 2) Memberikan aksesibilitas pengembangan usaha yang dimiliki,

- 3) Menambah pendapatan atau penghasilan KPM,
- 4) Membangun kemandirian usaha penerima manfaat,
- 5) Meningkatkan hubungan sosial yang semakin harmonis di dalam keluarga.

Diantara salah satu tujuan dari UEP yang diberikan adalah diharapkan dapat untuk memandirikan ekonomi usaha KPM, hal tersebut perlu diketahui apakah program UEP telah mampu memandirikan ekonomi KPM dengan berbagai keterbatasan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Bansos BPNT pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 dan masih bergulir hingga kini. Bansos BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang mana telah terdata di DTKS Kemensos agar tepat sasaran.

Dalam hal ini kedua program tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan pendataan yang transparan serta akuntabel. Oleh karena itu Kementerian Sosial meluncurkan website pendataan masyarakat fakir miskin. Aplikasi tersebut bertujuan agar semua bantuan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran.



Gambar 1 Tampilan aplikasi SIKNG

Sumber : diakses dari <https://siks.kemensos.go.id>

Dalam meningkatkan upaya transparansi data dan keakuratan proses penyaluran bantuan sosial khusus bagi masyarakat fakir miskin, Dinas Sosial oleh Kementerian sosial memperoleh akses data menggunakan aplikasi SIKS-NG dengan cara :

1. Login melalui alamat <https://siks.kemensos.go.id>;
2. Mendownload format nota kesepahaman/MoU dan ditandatangani oleh kepala Daerah/Kepala Dinas Sosial kab/kota;
3. Mengisi format nota kesepahaman/ MoU dan ditandatangani oleh Kepala Daerah/ Kepala Dinas Sosial Kab/Kota;
4. Meng-upload hasil scan nota kesepahaman/MoU yang sudah diisi dan ditandatangani disertai dengan surat permohonan kepada Menteri Sosial Cq: Dirjen Fakir Miskin (PFM) dari kepala Daerah/Dinas Sosial Kab/Kota ke SIKS-NG online. Hasil scan dalam format jpeg;
5. Mengirim surat permohonan kepada Menteri Sosial Cq: Dirjen Fakir Miskin (PFM), disertai dengan nota kesepahaman sebanyak 3 (tiga) rangkap yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas Sosial Kab/Kota;
6. Nota kesepahaman/ MoU berlaku setelah ditandatangani oleh Dirjen PFM dan

7. Sekretaris Eksekutif TNP2K. Nota kesepahaman/ MoU berlaku selama 5 Tahun; Data dan aplikasi dapat diakses setelah mendapat persetujuan dari Dirjen PFM dan Sekretaris Eksekutif TN2PK.

Dinas Sosial menunjuk setidaknya satu orang operator SIKS-NG ditingkat Kab/Kota. Kecamatan, desa/kelurahan dapat menunjuk setidaknya satu orang operator dimasing-masing kecamatan, desa/kelurahan. Penerima BPNT melalui Musyawarah Desa dilakukan tahapan verifikasi dan validasi diantaranya :

1. *Prelist* Awal. Terdiri dari Data BDT dan data Penerima KKS
2. Identifikasi *Prelist* awal penerima BPNT. Ada 2 (dua) cara mengidentifikasi hal tersebut diantaranya adalah
 - a. Pergantian Keluarga Penerima Manfaat
 1. Pindah alamat ke luar Desa/Keluraha/Pemerintahan setingkat.
 2. Meninggal dan tidak ada ahli waris
 3. Tercatat ganda atau lebih
 4. Menolak BPNT
 5. Ditemukan mampu
 6. Menjadi tenaga kerja Indonesia
 - b. Pengusulan KPM
Daftar usulan pengganti berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), diutamakan PKH yang belum menerima BPNT.
3. Dituangka dalam BA dan FRP
4. *Prelist* akhir (DPM-1)

Program digital ini dibuat untuk mengetahui data jumlah penduduk daerah yang pada dasarnya masuk kedalam golongan fakir miskin sehingga Dinas Sosial dapat menerima data yang valid. Tidak hanya itu dengan adanya program digital ini penerima bantuan akan tepat sasaran. Untuk pendataannya tentunya disaring dari beberapa tahapan seperti kelayakan tempat tinggal, profesi tetap atau tidak dan pendapatan.

KESIMPULAN

Dinsos Provinsi Sumatera Utara menerapkan program pengentasan kemiskinan, program yang dilakukan adalah berfokus pada pemberdayaan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Karena Disnoso Provinsi Sumatera Utara memperdayakan masyarakat bukan hanya memberikan bantuan saja melainkan melakukan pemberdayaan juga. Program ini juga di lihat dari keadaan masyarakat supaya bisa langsung berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam memberikan bantuan Dinas Sosial sangat bethati-hati untuk memberikan bantuan kepada masyarakat karena di takutkan tidak tepat sasaran kepada yang diberikan, Oleh sebab itulah digunakan sebuah *website* SIKS-NG. Kebaruan dari program ini adalah untuk menyeleksi masyarakat yang dapat menerima bantuan sesuai dengan syarat-syaratnya.

Penggunaan *Website* ini hanya dilakukan oleh ASN baik yang berada ditingkat terendah hingga tingkat tertinggi dan diawasi langsung oleh Kementerian Sosial, sehingga bantuan itu tepat sasaran kepada masyarakat yang notabeneanya benar-benar termasuk dalam golongan Fakir miskin.

Bantuan-bantuan yang di lakukan pemerintah yang terkhusus Dinas Sosial sangat membantu terhadap kemiskinan yang di rasakan masyarakat. Karena masyarakat merasa masih di perhatikan oleh pemerintah, bantuan yang di lakukan pemerintah juga bukan hanya tentang tunai saja tapi juga non tunai, contoh non tunai yaitu seperti bahan sembako yang bisa berguna bagi masyarakat.

Anak jalanan juga sangat di perhatikan karena dinsos Sumatera Utara beranggapan bahwa anak jalanan bisa mengakibatkan kemiskinan karena anak-anak yang terus di biarkan akan berdampak kepada masa depannya dan juga masa depannya. Maka dari itu masih sering terjadi razia terhadap anak jalanan lalu di rehabilitasi sampai ketemu keluarganya. Dalam hal kemiskinan pemerintah juga harus hadir untuk memastikan memberikan bantuan kepada orang-orang tidak mampu atau lebih bagus lagi bisa mensejahterakan masyarakatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Priyo Purnomo, "Management Of Small-Sustainable Coastal And Island Areas Based On Collaborative Management (Case Study In Bima Regency, West Nusa Tenggara)," 2019.
- H. K. H. Indah Dwi Maulana, Jainuri, "Good Governing Poverty Alleviation Through The Pkh Policy - Independent Women's Groups In Poverty Reduction In Batu City (Study At Batu City Social Service). Journal Of Local Government Issues," 2019, [Online]. Available: <https://doi.org/10.22219/logos.vol2.no2.193-209>.
- N. M. Rambe, "Revolusi 4.0 Berbasis Revolusi Mental. In: Tantangan Yang Dihadapi Dalam Duni Pendidikan Dan Social Studies Diera Revolusi Industri 4.0," 2018, [Online]. Available: <http://digilib.unimed.ac.id/35811/>
- M. N. N. F. Yusril Rahman Hakim, M Nurul Huda Pradana Putra, "Program Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Demi Mengentas Kemiskinan Di Era Revolusi 4.0 Di Kota Malang Dan Kota Batu", [Online]. Available: <http://research-report.umm.ac.id/index.php/psip/article/view/3524>
- M. Sipahelut, B. Wiryawan, And T. W. Nurani, "Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara", [Online]. Available: [https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53993/9/_8.Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halut %28strategi Pengembangan Perikanan Halut%29.Pdf](https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53993/9/_8.Analisis%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Nelayan%20Di%20Kecamatan%20Tobelo%20Kabupaten%20Halut%20strategi%20Pengembangan%20Perikanan%20Halut%29.Pdf)
- H. Suwardana, "Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. Jati Unik: Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri", [Online]. Available: <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jatiunik/article/view/117/0>
- A. Titin Rohayatin, Tulus Warsito, Ulung Pribadi And S. Nurmandi, Wahyudi Kumorotmo, "Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan", [Online]. Available: <http://fisip.unjani.ac.id/e-jurnal/jurnal-ilmu-pemerintahan/caraka-prabu-vol-01-no-01/faktor-penyebab-belum-optimalnya-kualitas-penyelenggaraan-pelayanan-publik-dalam-birokrasi-pemerintahan/>
- Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," 2011, [Online]. Available: <https://journals.ums.ac.id/index.php/jep/article/view/202/189>
- M. T. I. 2014 Nur Aliyah Zainal, "Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014", [Online]. Available: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/5811>
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/Huk/2017 Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin.

Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan.

Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677).